

KOMUNIKASI PEMBANGUNAN PARTISIPATIF SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN WISATA DI KAWASAN BANDUNG UTARA

MERIA OCTAVIANI¹, HADI SUPRPTO ARIFIN²

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran

(alamat)

¹meria.octavianti@unpad.ac.id , ²hsadalong85@gmail.com

ABSTRAK

Perum Perhutani, selain berperan dalam sistem perekonomian nasional, juga berperan dalam mendukung sistem kelestarian lingkungan dan sistem sosial budaya, khususnya dalam memberdayakan masyarakat di sekitar hutan, agar mereka bisa merasakan manfaat dari keberadaan hutan. Masyarakat diajak untuk merasa memiliki hutan di sekitar tempat tinggalnya, sehingga mereka dapat terlibat dalam pengelolaan dan pengamanan hutan dari masalah penjarahan. Masyarakat pun diajak untuk turut andil dalam pengembangan wilayah hutan sebagai sebuah tempat wisata dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana upaya yang dilakukan Perum Perhutani khususnya Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Utara dalam memberdayakan masyarakat dalam upaya pelestarian dan pengembangan hutan wisata di wilayah Bandung Utara. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini bersifat *multisources*, sehingga peneliti berusaha mengumpulkan data dari berbagai sumber yang terkait dengan topik yang dikaji. Observasi pada sejumlah kegiatan Perum Perhutani dan masyarakat di beberapa lokasi hutan wisata di wilayah Bandung Utara, wawancara kepada ADM dan Humas Perum Perhutani KPH Bandung Utara serta masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah hutan wisata dan pengunjung yang datang ke hutan wisata di Bandung Utara menjadi dua teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur yang dilakukan penulis pada berbagai dokumen yang terkait dengan topik yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi pembangunan partisipatif menjadi dasar dalam upaya pelestarian dan pengembangan hutan wisata di Kawasan Bandung Utara. “Konsep berbagi” dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), yang dicanangkan oleh Perhutani KPH Bandung Utara mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat desa hutan dalam membangun dan mengelola hutan wisata di sekitar tempat tinggalnya. Berbagi peran, berbagi waktu, berbagi ruang, dan berbagi hasil menjadi dasar kolaborasi antara pihak Perhutani KPH Bandung Utara dengan masyarakat desa hutan dalam menyusun, merencanakan dan memutuskan pengelolaan yang tepat untuk sebuah hutan wisata dengan tetap berpendirian teguh pada upaya pelestarian lingkungan.

Kata Kunci : *Komunikasi Partisipatif, Komunikasi Lingkungan, Hutan Wisata, Kesadaran Lingkungan, Pelestarian Lingkungan*

PENDAHULUAN

Perhutani memiliki peran dalam sistem perekonomian nasional yang mendukung sistem kelestarian lingkungan dan sistem sosial budaya, khususnya dalam memberdayakan masyarakat di sekitar hutan, agar mereka bisa merasakan manfaat dari keberadaan hutan. Berdasarkan pada PP Nomor 72 Tahun 2010 maksud dan tujuan dari Perhutani adalah untuk menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan pengelolaan hutan dan hasil hutan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam rangka mengelola hutan dan hasil hutan ini, Perhutani mengajak masyarakat untuk turut andil dalam pengembangan wilayah hutan sebagai sebuah tempat wisata dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Masyarakat diajak untuk merasa memiliki hutan di sekitar tempat tinggalnya, sehingga mereka dapat terlibat dalam pengelolaan dan pengamanan hutan dari masalah penjarahan.

Pengelolaan hutan secara berkelanjutan sangat diperlukan agar hutan tetap lestari. Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, menurut *International Tropical Timber Organization* (2005) dalam Udiansyah (2009), merupakan proses mengelola hutan untuk mencapai satu atau lebih tujuan pengelolaan tertentu yang jelas dalam menghasilkan barang dan jasa hutan yang diperlukan secara berkelanjutan, tanpa adanya pengurangan terhadap nilai dan produktivitas hutan di masa yang akan datang dan tanpa adanya dampak yang tidak diharapkan lingkungan fisik dan sosial. Definisi tersebut menunjukkan bahwa hutan yang dikelola secara berkelanjutan, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, 1) produksi bukan hanya kayu tetapi juga jasa, 2) produktivitas dan nilai hutan tidak berkurang, serta 3) tidak ada dampak terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar hutan tersebut. Pengelolaan hutan memerlukan perencanaan agar tercapai hutan yang berkelanjutan. Perencanaan hutan meliputi inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan hutan, dan penyusunan rencana kehutanan. Perencanaan dan pengelolaan hutan tersebut memerlukan partisipasi dari berbagai pihak. Selain Perhutani, masyarakat, aparatur desa dan para stakeholder juga perlu bersatu untuk bisa bersama-sama memikirkan keberadaan hutan secara berkelanjutan.

Kerusakan hutan yang disebabkan oleh penjarahan besar-besaran yang terjadi pada tahun 1998 – 2010, menyadarkan Perhutani bahwa hutan tidak akan lestari apabila hanya dikelola secara sentralistik oleh Perhutani saja, melainkan harus melibatkan masyarakat yang selama ini banyak diabaikan. Selain itu, alih fungsi hutan di Kawasan Bandung Utara yang dahulu merupakan hutan produksi dan sekarang sudah dialihfungsikan menjadi hutan lindung, mengharuskan adanya upaya-upaya untuk terus mempertahankan eksistensi hutan yang saat ini jumlahnya semakin menurun. Menurut Wakil Administratur Perhutani KPH Bandung Utara Asep Aan Darsana, luas hutan untuk Kawasan Bandung Utara sekarang hanya 10.230 hektare atau hanya sekitar 30% dari total seharusnya luas hutan di wilayah Bandung Utara yang berfungsi sebagai daerah resapan untuk wilayah cekungan Bandung.

Hal tersebut menjadikan alasan utama mengapa diperlukan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hutan dan agar hutan tetap memberikan kontribusi yang positif baik bagi lingkungan maupun bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan (masyarakat desa hutan). Pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan upaya untuk memberikan ruang bagi masyarakat agar aktif berpartisipasi dalam menentukan arah tujuan yang hendak dicapai. Dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat tersebut Perhutani membangun sebuah sistem yang dikenal dengan Pengembangan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) melalui SK Nomor 136/KPTS/DIR/2001. Melalui PHBM ini Perum Perhutani membuka kesempatan kepada

masyarakat akan berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan untuk terlibat aktif dalam pengelolaan hutan. Perhutani dituntut untuk memberikan perhatian yang besar terhadap masalah sosial ekonomi masyarakat, terkait pengentasan kemiskinan terutama untuk masyarakat desa hutan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan mendukung peningkatan Indeks Pembangunan manusia (IPM) yang meliputi peningkatan daya beli, pendidikan dan kesehatan. Dalam perkembangannya PHBM mengalami perubahan pada tahun 2007 dengan SK 268/KPTS/DIR/2007

Penelitian yang telah dilakukan oleh Bahruzin pada tahun 2014 mengenai “*Analisis Efektivitas Kelembagaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Utara Jawa Barat*” menunjukkan bahwa sistem PHBM di KPH Bandung Utara terbentuk berdasarkan kebutuhan pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan namun juga tetap dapat menunjang ekonomi rumah tangga masyarakat desa hutan. Sistem PHBM dilaksanakan semenjak perubahan status kawasan hutan KPH Bandung Utara dari hutan produksi menjadi hutan lindung. Adapun aktor yang terlibat dalam pembentukan PHBM adalah Perum Perhutani, Masyarakat dan stakeholder.

Wismo Tri Kancono, selaku Administratur Kesatuan Pemangkuan Hutan Bandung Utara Perum Perhutani menyatakan bahwa untuk memperoleh peluang peningkatan pendapatan bagi hasil, masyarakat desa hutan yang tergabung pada LMDH setempat diajak mampu mengembangkan potensi wisata di wilayahnya masing-masing. Pengembangan objek wisata merupakan salah satu ikhtiar yang digenjut KPH Bandung Utara untuk mendongkrak pendapatan dari sektor hasil hutan bukan kayu. Hal tersebut yang menjadi salah satu pendorong, munculnya banyak hutan yang dikelola menjadi sebuah tempat wisata baru yang menarik pengunjung untuk datang dan menikmati keindahan alam dari hutan di Kawasan Bandung Utara (KBU). Seiring dengan peningkatan perekonomian masyarakat yang tinggal di sekitar daerah hutan wisata, kelestarian dan keindahan hutan pun semakin terjaga dengan munculnya hutan-hutan wisata ini. Puncak Bintang di Kecamatan Cimenyan dan PAL 16 di Kecamatan Cikole merupakan dua contoh, dari sekian banyak hutan di Bandung Utara yang dijadikan hutan wisata oleh kolaborasi dari Perhutani, masyarakat hutan desa yang dalam hal ini diwakili oleh LMDH dan para *stakeholder* lainnya.

Kolaborasi tidak serta merta berlangsung dengan baik. Banyak hambatan dan rintangan dalam meyakinkan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini. Persamaan persepsi dari berbagai pihak, khususnya Perhutani dan masyarakat desa hutan yang diwakili oleh LMDH merupakan faktor kunci dalam menyukseskan konsep hutan wisata. Tanpa adanya kesamaan pengetahuan, pemahaman, dan keyakinan di antara berbagai pihak maka pelestarian hutan sulit untuk direalisasikan. Komunikasi menjadi salah satu faktor utama dan pertama yang harus dilakukan dalam penyamaan pengetahuan, pemahaman, dan keyakinan tersebut.

Konsep komunikasi seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, merupakan konsep Komunikasi Pembangunan Partisipatif atau *Participatory Development Communication* sendiri sudah populer pada pertengahan tahun 1990-an (Bessette dan Raja Sundaram, 1996; Bessette, 2004; 2006). Komunikasi Pembangunan Partisipatif ini merupakan salah satu bentuk dari komunikasi sosial. Kemunculan konsepsi Komunikasi Pembangunan Partisipatif atau yang lebih dikenal dengan istilah kembangpar, kemudian diikuti dengan munculnya konsepsi lain yaitu *Participatory Communication* atau *Participatory Communication for Social Change* (Servaes *et al.*, 1996; Servaes, 2002a; Kim, 2005). Konsepsi ini muncul sejalan dengan mulai bergesernya paradigma komunikasi pembangunan dari paradigma difusi ke paradigma pemberdayaan. Sekaligus merupakan sebuah alternatif pilihan untuk menjawab kurangnya kontribusi komunikasi pada pembangunan di negara-negara berkembang selama

masa dekade pembangunan pertama yang pernah dicanangkan PBB yang banyak menaruh harapan besar pada komunikasi massa sebagai agen perubahan seperti yang pernah dipromosikan oleh Schramm (1964).

Pengembangan masyarakat memberikan penjelasan rinci mengenai konsep pemberdayaan yang lebih terkait pada konsep partisipasi, mandiri, keadilan dan jaringan kerja. Pemberdayaan sebenarnya diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial (komunitas). Masyarakat yang telah berdaya dapat dicirikan sebagai berikut : 1) mampu memahami diri dan potensinya, 2) mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan) dan mengarahkan dirinya sendiri, 3) memiliki kekuatan untuk berunding dan bekerjasama secara saling menguntungkan dengan “*bargaining power*” yang memadai, 4) bertanggungjawab atas tindakan sendiri (Hadiyanto, 2008).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana bentuk komunikasi pembangunan partisipatif yang terjadi dalam upaya pelestarian dan pengembangan hutan wisata di Kawasan Bandung Utara (KBU).

METODE PENELITIAN

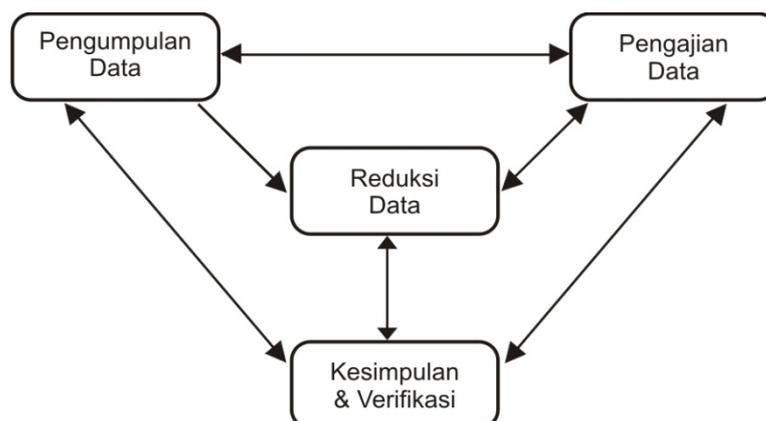
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini berusaha memberikan uraian dan penjelasan komprehensif mengenai upaya-upaya yang dilakukan Perhutani, khususnya Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Utara dalam memberdayakan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pelestarian dan pengembangan hutan wisata di wilayah Bandung Utara. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan Mulyana (2002: 201) bahwa studi kasus merupakan uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program, atau suatu situasi sosial. Dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok, atau suatu kejadian, peneliti ingin memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti.

Pendekatan ini menganggap kasus sebagai entitas menyeluruh dan bukan sebagai kumpulan bagian-bagian atau kumpulan skor mengenai variabel (Ragin dalam Mulyana, 2002: 203). Sehingga studi kasus bersifat holistik dan *multisources*. Oleh karena itu peneliti berusaha mengumpulkan data dari berbagai sumber yang terkait dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan studi literatur. Observasi dilakukan pada sejumlah kegiatan Perhutani dan masyarakat di beberapa lokasi hutan wisata di wilayah Bandung Utara, seperti Puncak Bintang dan PAL 16 Wisata Hutan Pinus. Wawancara dilakukan kepada Administratur Perum Perhutani KPH Bandung Utara, Wismo Tri Kancono serta beberapa masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan pengunjung yang datang ke hutan wisata di Bandung Utara. Observasi dan wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur yang dilakukan penulis pada berbagai dokumen yang terkait dengan topik yang dikaji.

Analisis data penelitian dilakukan dengan menggunakan *interactive model* seperti yang digambarkan dalam bagan di bawah ini :

Bagan 1

Komponen Analisis data Model Interaktif (*Interactive Model*)



Sumber: Matthew B. Miles & Michael A. Huberman (1992) Analisis Data Kualitatif UI Press Jakarta Hlm. 20 dalam Agus Salim (2001: 22)

Dari bagan di atas tergambar bahwa analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu (1) proses pemilihan, yaitu pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang di peroleh di lapangan atau yang biasa dikenal dengan reduksi data (*data reduction*), (2) penyajian data (*data display*), yaitu mendeskripsikan kumpulan informasi yang telah tersusun, untuk selanjutnya dilakukan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperoleh di lapangan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas, dan proposisi. Selama penelitian masih berlangsung, setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus-menerus diverifikasi hingga benar-benar diperoleh kesimpulan yang valid dan kokoh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhutani sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan dan mengemban tugas serta wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Hutan (SDH), secara teknis mendapatkan beberapa hambatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Banyak pihak yang harus dirangkul dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan aspek produksi/ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan.

Dalam operasionalnya, Perhutani bekerja di bawah koordinasi Kementerian BUMN dengan bimbingan teknis dari Departemen Kehutanan. Dalam melakukan tugas dan fungsinya, Perhutani mengalami beberapa hambatan. Banyak tekanan yang diterima pihak Perhutani dari masyarakat yang tinggal di sekitaran hutan milik Perhutani. Tekanan-tekanan tersebut menjadi kendala Perhutani dalam upaya pelestarian dan pengembangan hutan wisata di Kawasan Bandung Utara. Tekanan-tekanan tersebut menjadi hambatan yang harus diatasi terlebih dahulu agar program-program yang dicanangkan sebagai upaya pelestarian dan pengembangan hutan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memperoleh hasil yang maksimal.

Bandung Utara merupakan wilayah krusial di daerah Bandung dikarenakan kawasan tersebut merupakan kawasan resapan air yang menjaga keseimbangan ekosistem alam. Kota Bandung yang bertipografi cekungan, memerlukan banyak hutan yang berfungsi sebagai

resapan air. Pada kenyataannya, menurut Wakil Administratur Perhutani KPH Bandung Utara Asep Aan Darsana, luas hutan untuk Kawasan Bandung Utara sekarang hanya 10.230 hektare atau hanya sekitar 30% dari total seharusnya luas hutan di wilayah Bandung Utara yang berfungsi sebagai daerah resapan untuk wilayah cekungan Bandung. Hal tersebut yang menjadikan pendorong bagi Perhutani untuk dapat menjaga dan mengelola keberadaan hutan.

Pengelolaan hutan di Kawasan Bandung Utara, tidak bisa hanya dilakukan oleh Perhutani KPH Bandung Utara saja, tetapi diperlukan sinergi yang aktif dengan masyarakat desa hutan yang dalam hal ini diwakili oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan juga para *stakeholder* lainnya. Sinergitas dapat muncul apabila permasalahan-permasalahan mendasar telah disadari dan diatasi. Beberapa permasalahan yang muncul dari upaya pelestarian dan pengembangan hutan wisata di Kawasan Bandung Utara secara garis besar dapat dikategorikan ke dalam 3 faktor utama, yaitu (1) faktor personal, (2) faktor ekonomi, dan (3) faktor budaya.

Faktor personal yang menjadi permasalahan utama adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa hutan di Kawasan Bandung Utara. Walaupun secara jarak, lokasi desa hutan di Kawasan Bandung Utara tidak terlalu jauh dengan wilayah perkotaan dan jarak menuju sekolah pun tidak terlalu jauh, tetapi secara kenyataan tingkat pendidikan masyarakat desa hutan ini masih rendah. Masih banyak masyarakat yang hanya menyelesaikan pendidikan sampai tingkat dasar. Hal tersebut berimplikasi pada mata pencaharian sehari-harinya dan tingkat ekonomi keluarga. Selain itu, pola pikir mereka pun menjadi tertutup akan perkembangan zaman.

Faktor yang kedua adalah tingkat perekonomian masyarakat yang rendah. Dikarenakan tingkat pendidikannya rendah maka hal tersebut berimplikasi pada rendahnya pendapatan yang diperoleh untuk setiap bulannya. Rendahnya tingkat pendapatan, menjadi salah satu alasan mereka melakukan hal-hal yang di luar apa yang diperbolehkan, seperti penebangan liar dan pembukaan hutan untuk dijadikan lahan berkebun.

Faktor yang ketiga adalah faktor budaya yang mereka anut. Kebanyakan dari masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah hutan Perhutani, walaupun memiliki tingkat pendidikan dan perekonomian yang rendah, tetapi mereka memiliki "*gengsi*" yang tinggi. Banyak dari mereka, terutama yang masih muda, enggan untuk bekerja melestarikan dan memberdayakan hutan. Mereka lebih memilih untuk menjual lahan yang mereka miliki untuk dapat pergi dan bekerja di Kota Bandung. Hal tersebut yang menyebabkan banyak lahan di Wilayah Bandung Utara yang akhirnya dikelola dan dikembangkan oleh pengembang yang datang dari luar wilayah tersebut. Kondisi tersebut yang menjadikan masyarakat asli di wilayah tersebut merasa terasingkan di wilayahnya sendiri.

Ketiga faktor penyebab permasalahan di atas haruslah dicarikan solusinya. Perhutani KPH Bandung Utara berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melakukan beberapa upaya berupa pendekatan personal yang disesuaikan dengan karakter masyarakat di wilayah tersebut. Puncak Bintang merupakan proyek awal Perhutani dalam upaya pelestarian dan pengembangan hutan wisata di Kawasan Bandung Utara. Suksesnya Puncak Bintang saat ini menjadi bukti bahwa apa yang dilakukan oleh Perhutani sudah efektif dan efisien. Dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat, Puncak Bintang adalah wilayah hutan wisata pertama yang di Kawasan Bandung Utara yang dinyatakan memiliki tingkat pertumbuhan dan perkembangan partisipasi masyarakat yang tinggi. Seperti yang dinyatakan oleh Margono

Slamet (1985), bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh 3 (tiga) unsur pokok, yaitu: (1) adanya kemauan yang diberikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi, (2) adanya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi, (3) adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Ketiga hal tersebut telah muncul dan berkembang di wilayah hutan wisata Puncak Bintang.

Kesuksesan Puncak Bintang sebagai *pilot project* Perhutani, memberikan kemudahan untuk mengembangkan hutan wisata di wilayah lain. Perhutani tinggal menularkan model pendekatan yang dilakukan di Puncak Bintang ke wilayah-wilayah lain yang akan dikembangkan menjadi hutan wisata, salah satunya adalah Pal 16 di Kecamatan Cikole. *Word of mouth* menjadi strategi jitu dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat di wilayah lain tersebut. Uraian tersebut menunjukkan bahwa pada akhirnya partisipasi masyarakat lah yang berhasil menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dan upaya pelestarian dan pengembangan wilayah hutan wisata pun berjalan dengan lancar dan sukses.

Komunikasi Pembangunan Partisipatif menurut Bessette (2004) adalah suatu aktifitas yang direncanakan yang didasarkan pada proses-proses partisipatif di satu sisi, dan pemanfaatan media komunikasi dan komunikasi tatap muka disisi lain, dengan tujuan untuk memfasilitasi dialog di antara pemangku kepentingan yang berbeda, yang berkisar pada perumusan masalah atau sasaran pembangunan bersama, mengembangkan dan melaksanakan atau menjabarkan seperangkat aktivitas yang memberi kontribusi untuk mencari solusi yang didukung bersama.

Proses-proses partisipatif yang dimaksud di sini adalah adanya partisipasi komunitas, dalam hal ini adalah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), yang terlibat aktif dalam menyusun, merancang, dan memutuskan mengenai cara dan upaya pengembangan hutan wisata dengan tetap berpegang teguh pada upaya pelestarian dan pemanfaatan hutan. Dalam komunikasi pembangunan partisipatif ini, makna komunikasi yang secara umum, mengalami sedikit perubahankarena adanya pergeseran peran dari yang fokusnya menginformasikan dan membujuk masyarakat untuk mau mengubah perilaku atau sikap, kepada menyediakan fasilitas diantara pemangku kepentingan yang berbeda untuk menentukan masalah bersama. Artinya dari pendekatan *topdown*, linier dan searah menuju pendekatan horisontal, interaktif dan dialogis.

Komunikasi pembangunan partisipatif lebih berorientasi kepada *receiver* (khalayak penerima) ketimbang kepada *sender* (sumber). Proses ini dapat berlangsung ketika yang menjadi titik masuknya adalah bukan hanya pada masalah pembangunan itu sendiri, tetapi sasaran atau tujuan yang ditentukan bersama di tingkat komunitas (Servaes & Malikhao, 2002). LMDH sebagai mitra Perhutani diajak untuk melakukan identifikasi bersama mengenai berbagai permasalahan yang ada di wilayah yang akan dijadikan hutan wisata. Sebagai perbandingan, pihak Perhutani KPH Bandung Utara, dalam hal ini Administatur Perhutani KPH Bandung Utara Wismo Tri Kancono beserta beberapa stafnya, langsung mengajak masyarakat yang tergabung dalam LMDH untuk mendatangi beberapa lokasi wisata di hutan yang sudah ada sebelumnya di Kawasan Bandung Selatan. Mereka diajak ke Kawah Putih, Ranca Upas dan Pemandian Air Hangat Cimanggu. Di sana, mereka diminta untuk melakukan observasi dan diakhiri dengan melakukan evaluasi dari hasil obeservasinya tersebut. Dengan melihat dan merasakan secara langsung berada di tempat wisata, mereka akhirnya mendapatkan pengetahuan akan tempat wisata yang baik menurut pandangan

mereka sendiri. Mereka pun akhirnya menyadari bahwa menjadikan wilayah hutan tempat tinggalnya sebagai hutan wisata merupakan ide yang cemerlang dan akhirnya pun mereka mau untuk menyusun rencana dan konsep pengembangan hutan wisata di wilayahnya. Hal ini memnunjukkan bahwa sasaran atau tujuan dikembangkannya hutan wisata ditentukan oleh LMDH di wilayah tersebut. Perhutani hanya menjalankan fungsi fasilitator.

Komunikasi pembangunan partisipatif ini memberi konsekuensi pada peranan baru komunikasi yang lebih ditekankan pada kebutuhan untuk membantu seluruh proses melalui pertukaran informasi secara interaktif atau transaksional. LMDH sebagai sebuah komunitas masyarakat desa hutan, mengidentifikasi kebutuhan akan informasi dan komunikasinya. LMDH diposisikan sebagai mitra sejajar dalam mengembangkan pesan dan memproduksi media komunikasi sebagai upaya pengembangan hutan wisata di wilayahnya. Melalui komunikasi partisipatif kemungkinan terjadinya konflik di antara kelompok, komunitas dan pemangku kepentingan lainnya dapat dihindari.

Menurut Uphoff (1985) partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam pengembangan sebuah program, dibagi pada empat jenis yang berbeda, yaitu (1) partisipasi dalam pelaksanaan, dimana masyarakat secara aktif dimobilisasi untuk mengambil bagian dalam aktualisasi program dan mereka diberi tanggung jawab untuk mengatur tugas-tugas tertentu, (2) partisipasi dalam evaluasi, dimana setelah selesainya program, masyarakat diajak untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan dari program yang telah dilaksanakan, (3) partisipasi dalam manfaat, dimana masyarakat dapat mengambil bagian dalam menikmati hasil dari program yang telah dilakukan, dan (4) partisipasi dalam pengambilan keputusan, dimana masyarakat diajak untuk memulai dan mendiskusikan konsep dari program yang akan dilaksanakan. Dalam konteks pelestarian dan pengembangan hutan wisata di Kawasan Bandung Utara, keempat jenis partisipasi yang disebutkan tersebut, dilakukan oleh LMHD sebagai lembaga masyarakat desa hutan di Kawasan Bandung Utara. LMHD berpartisipasi dalam pelaksanaan, evaluasi, manfaat, dan pengambilan keputusan.

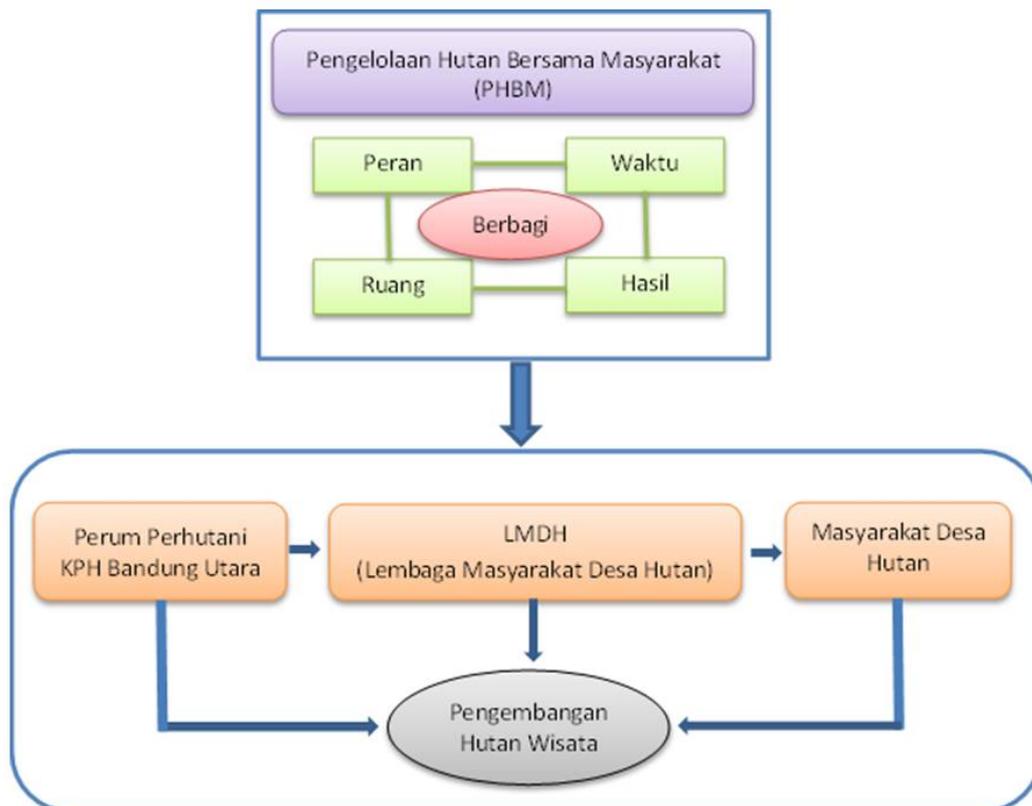
Dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), Perhutani KPH Bandung Utara mengusung konsep “berbagi”, yaitu berbagi peran, berbagi waktu, berbagi ruang dan berbagi hasil. PHBM merupakan revolusi dari pendekatan *state-based forest management* (pengelolaan hutan berbasis negara) menjadi *community-based forest management* (pengelolaan hutan berbasis komunitas). Masyarakat dalam hal ini berperan besar dalam proses mulai dari perencanaan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan hingga pemanenan dan pemanfaatan hasil-hasilnya. Hasil yang diharapkan adalah terjadi saling berbagi (*sharing*) dalam penyediaan sumberdaya maupun menikmati hasil. Implikasi lebih jauh, yakni pengelolaan hutan disesuaikan dengan kebutuhan dan tradisi komunitas setempat. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) lebih menekankan kepada masyarakat sebagai subjek yang harus benar-benar turut andil dalam mekanisme pengelolaan. Masyarakat dalam hal ini LMDH memiliki akses yang simetris dengan pihak Perhutani dalam mengelola hutan. LMDH dapat bergerak bersama di bawah naungan Perhutani untuk memperkuat kapasitasnya (Mayasari, 2015).

Dalam konteks Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), pendekatan yang partisipatif dan dialogis dipilih dalam menjembatani kepentingan di dalam pengelolaan hutan, sehingga pada konteks manajemen konflik, kontribusi PHBM akan menjadi begitu signifikan mengingat metode polisional (*security approach*) tidak lagi dikedepankan. Melalui intensitas

interaksi yang cukup tinggi antara LMDH dan Perhutani menjadikannya persoalan-persoalan dalam pengelolaan hutan dapat diselesaikan secara komprehensif

Secara umum, penelitian mengenai komunikasi pembangunan partisipatif sebagai upaya pelestarian dan pengembangan hutan wisata di Kawasan Bandung Utara, dapat dilihat dalam bagan 2.

Bagan 2
Model Komunikasi Pembangunan Partisipatif sebagai Upaya Pelestarian dan Pengembangan Hutan Wisata di Kawasan Bandung Utara



PENUTUP

Komunikasi pembangunan partisipatif merupakan hal yang mendasar dalam upaya pelestarian dan pengembangan hutan wisata di Kawasan Bandung Utara. “Konsep berbagi” dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), yang dicanangkan oleh Perhutani KPH Bandung Utara mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat desa hutan dalam membangun dan mengelola hutan wisata di sekitar tempat tinggalnya, dengan tetap berpegang teguh pada upaya pelestarian hutan.

Perubahan pengetahuan, keyakinan, dan kemampuan masyarakat desa hutan di Kawasan Bandung Utara, juga muncul berkat adanya pendekatan personal yang dilakukan oleh pihak Perhutani KPH Bandung Utara, melalui konsepsi berbagi peran, berbagi waktu, berbagi ruang dan berbagi hasil yang dilakukan bersama-sama dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), yang notabene merupakan perwakilan dari masyarakat desa hutan itu sendiri.

Pendekatan personal yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat setempat, dan ditambah dengan pengaplikasian dari konsep “berbagi” yang dilakukan oleh Perhutani KPH Bandung Utara, telah berhasil menyesuaikan program pelestarian dan pengembangan hutan wisata di Kawasan Bandung Utara. Hal tersebut dapat dijadikan contoh untuk wilayah-wilayah lain, khususnya di Jawa Barat, umumnya di Indonesia, yang akan melakukan pengembangan hutan wisata, untuk dapat melakukan hal yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Salim. (2001). Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta: Tiara wacana
- Bahruzin, 2014. Analisis Efektivitas Kelembagaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Utara Jawa Barat. Bogor: Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Bessette, Guy (2004). Involving the Community: A Guide to Participatory Development Communication. Southbound: International Development Research Centre.
- Bessette, Guy and Rajasunderam, C.V. (Ed.) (1996). Participatory Development Communication: A West African Agenda. Ottawa: International Development Research Centre.
- Mulyana, Deddy. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja. Rosdakarya.
- Perum Perhutani. 2001. Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. [internet]. Tersedia pada : <http://arupa.or.id/sources/uploads/2012/04/2-SK-Dewan-Pengawas-No.-136-2001-PHBM.pdf>
- Perum Perhutani. 2007. Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. [internet]. Tersedia pada : <http://arupa.or.id/sources/uploads/2012/04/5-SK-Direksi-No.-268-tahun-2007-PHBM-Plus.pdf>
- PP Menhut 2014. [internet]. Tersedia pada : <http://ppkh.dephut.go.id/uploads/attach/P.16-Menhut-II-2014.pdf>
- Schramm, Wilbur. 1964. Mass Media and National Development. Stanford : Stanford University Press and Unesco
- Servaes, J. and Malikhao, P. 2002. Chapter 7. Development Communication Approaches in an International Perspective.
- Udiansyah. 2009. *Perencanaan Hutan adalah Tiang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*. Dalam : Soendjoto MA dan Kurnain A, editor. Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Kesejahteraan dan Keberlanjutan. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat Press.
- Uphoff, Norman. 1985. Participatory Evaluation of Participatory Development: a Scheme for Measuring and Monitoring Local Capacity. Newyork: Cornell University

